



**PERJANJIAN PEKERJAAN REKONSTRUKSI DALAM
KAITANNYA DENGAN KETERLAMBATAN PENETAPAN
MUTUAL CHECK AWAL PADA PEKERJAAN
REKONSTRUKSI BENDUNG/CEKDAM SUNGAI LIMAU
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Hukum**

Oleh

**DENNY WAHYUDI SAPUTRA, S.E
NIM. 2320119006**

**Dosen Pembimbing
PROF. DR. BUSYRA AZHERI.,S.H.,M.HUM
DR. M. HASBI.,S.H.,M.HUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam pelaksanaan proyek rekonstruksi Bendung/Cekdam Sungai Limau di Kabupaten Padang Pariaman, khususnya terkait keterlambatan penetapan Mutual Check Awal (MC-0). Meskipun MC-0 merupakan instrumen penting dalam menentukan volume aktual pekerjaan, dalam praktiknya MC-0 pada proyek ini dilakukan setelah penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), rapat pra konstruksi (Pre-Construction Meeting/PCM), dan mobilisasi alat di lapangan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian administratif dan teknis yang berdampak terhadap keakuratan pelaksanaan dan potensi perubahan kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah keterlambatan MC-0 tetap relevan terhadap persetujuan principal dalam memulai pekerjaan, serta bagaimana upaya hukum yang dapat diambil untuk memitigasi konsekuensi dari keterlambatan tersebut. Rumusan masalah difokuskan pada validitas pelaksanaan pekerjaan yang dimulai sebelum MC-0, dan kemungkinan wanprestasi administratif akibat ketidaksesuaian antara data teknis dan realitas lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap Pejabat Pembuat Komitmen BPBD dan pihak kontraktor (PT Suci Esalestari). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan MC-0 bukan menjadi hambatan dalam penerbitan SPMK, namun memunculkan potensi perbedaan volume pekerjaan yang berdampak pada terbitnya Contract Change Order (CCO), ketidaktepatan pencatatan prestasi kerja, dan risiko administrasi dalam pembayaran. Untuk itu, perlu dirumuskan klausul kontrak yang tegas mengenai jadwal MC-0, peningkatan koordinasi antar pihak sebelum pelaksanaan fisik, serta pencantuman klausul force majeure administratif untuk menghindari perdebatan tanggung jawab.

Kata Kunci: *Perjanjian rekonstruksi, Mutual Check Awal, MC-0, wanprestasi administratif, pekerjaan konstruksi.*



ABSTRACT

This research is motivated by problems in the implementation of the reconstruction project of Sungai Limau Dam/Weir in Padang Pariaman Regency, especially related to the delay in determining the Initial Mutual Check (MC-0). Although MC-0 is an important instrument in determining the actual volume of work, in practice MC-0 in this project is carried out after the signing of the Work Start Order (SPMK), the Pre-Construction Meeting (PCM), and the mobilization of equipment in the field. This condition creates administrative and technical uncertainty that has an impact on the accuracy of implementation and potential changes to the contract. This study aims to analyze whether the delay in MC-0 remains relevant to the principal's agreement to start work, and what legal measures can be taken to mitigate the consequences of the delay. The formulation of the problem focuses on the validity of the implementation of work that began before MC-0, and the possibility of administrative default due to inconsistencies between technical data and field reality. The method used is a juridical-sociological approach, with data collection techniques through literature studies and in-depth interviews with the BPBD Commitment Making Officer and the contractor (PT Suci Esalestari). The results of the study indicate that the delay in MC-0 is not an obstacle in the issuance of SPMK, but raises the potential for differences in work volume that have an impact on the issuance of Contract Change Order (CCO), inaccuracy in recording work performance, and administrative risks in payments. For this reason, it is necessary to formulate a clear contract clause regarding the MC-0 schedule, improve coordination between parties before physical implementation, and include an administrative force majeure clause to avoid debates over responsibility.

Keywords: *Reconstruction agreement, Initial Mutual Check, MC-0, administrative default, construction work.*

